



INSPEKTORAT
KABUPATEN KAPUAS HULU

**LAPORAN
PENGUKURAN
DAN EVALUASI
KINERJA
INSPEKTORAT
TW IV Tahun 2022**

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi internal merupakan salah satu unsur penilaian kinerja dalam periode tertentu, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tentang tingkat capaian kinerja dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Inspektorat sebagai salah satu Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berkompeten didalam pelaksanaan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya terus menerus untuk menjadi lembaga yang amanah, professional, dan akuntabel agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat merupakan unit kerja yang tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- d. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- e. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. koordinasi program pengawasan;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Inspektur;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
2. Sekretaris Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
3. Inspektur Pembantu I, II, III, IV;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari :
 - Auditor;
 - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - Auditor Kepegawaian.
5. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan sasaran program dan Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

1. Sasaran Program

Sasaran Program yang hendak dicapai oleh Inspektorat antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;
2. Meningkatnya Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;
3. Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem; Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3;
4. Meningkatnya Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal “BB”;
6. Meningkatnya Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;
7. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi;
8. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas HUU;
9. Meningkatnya Predikat SAKIP.

2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi sasaran program yang akan dicapai dalam kurun 1 (satu) tahun antara lain sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;
2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;
3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3;
4. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal “BB”;
6. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;
7. Nilai Reformasi Birokrasi;

8. Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas Hulu;
9. Predikat SAKIP.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Sasaran Program dan Indikator Kinerja

No.	\Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;	86%
2.	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;	88%
3.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem; Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3;	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3;	40%
4.	Meningkatnya Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;	75
5.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal "BB";	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal "BB";	85%
6.	Meningkatnya Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;	2 OPD
7.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi;	Nilai Reformasi Birokrasi;	30
8.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas Hulu;	Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas Hulu;	Level 3
9.	Meningkatnya Predikat SAKIP.	Predikat SAKIP	BB

BAB III
EVALUASI KINERJA

A. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.1
Realisasi Pengukuran Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2021/23			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;	86%	82%	82.56	81.42	80.72
2.	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;	88%	100%	100	100	100
3.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem; Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	40%	0	0	0	0
4.	Meningkatnya Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;	75	60	60	60	82

5.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal “BB”;	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal “BB”;	85%	73.07	65.38	65.38	65.38
6.	Meningkatnya Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;	2 OPD	0	0	0	0
7.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi;	Nilai Reformasi Birokrasi;	30	30	31.50	31.50	31,50
8.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten	Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas Hulu;	Level 3	2	2	2	2
9.	Meningkatnya Predikat SAKIP.	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB

a. Indikator Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti

Dari tahun 2007 Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 jumlah rekomendasi temuan sebanyak 3915 rekomendasi dan yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 3160 rekomendasi. Sehingga capaian kinerja penyelesaian tindak lanjut temuan sebesar 80,72 % dari target kinerja tahun 2022 sebesar 95%. Belum tercapainya target pada triwulan IV tahun 2022 ini disebabkan banyaknya permintaan kegiatan tambahan sehingga penyelesaian tindak lanjut yang disusun didalam PKPT tahun 2022 akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya. Disarankan agar pada masing-masing irban untuk memprioritaskan penyelesesain tindak lanjut dalam program pengwasan tahun selanjutnya.

b. Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

- Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditampung oleh Inspektorat adalah sebanyak 4 (empat) pengaduan yaitu pada Desa Tanjung Jati, Desa Permata - Pengkadan, Lubuk Pengail - Kecamatan Suhaid, dan Desa Nanga Seberuang. Dan semua pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti sehingga pada triwulan II tahun 2022 telah mencapai target.

Tabel 3.2
Realisasi Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

No	Sumber pengaduan	Lokasi	Status		
			Diterima	Ditindaklanjuti	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2022	Desa Tanjung Jati	√	√	√
2	2022	Desa Nanga Seberuang	√	√	√
3	2022	Desa Permata	√	√	√
4	2022	Desa Lubuk Pengail	√	√	√

c. Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

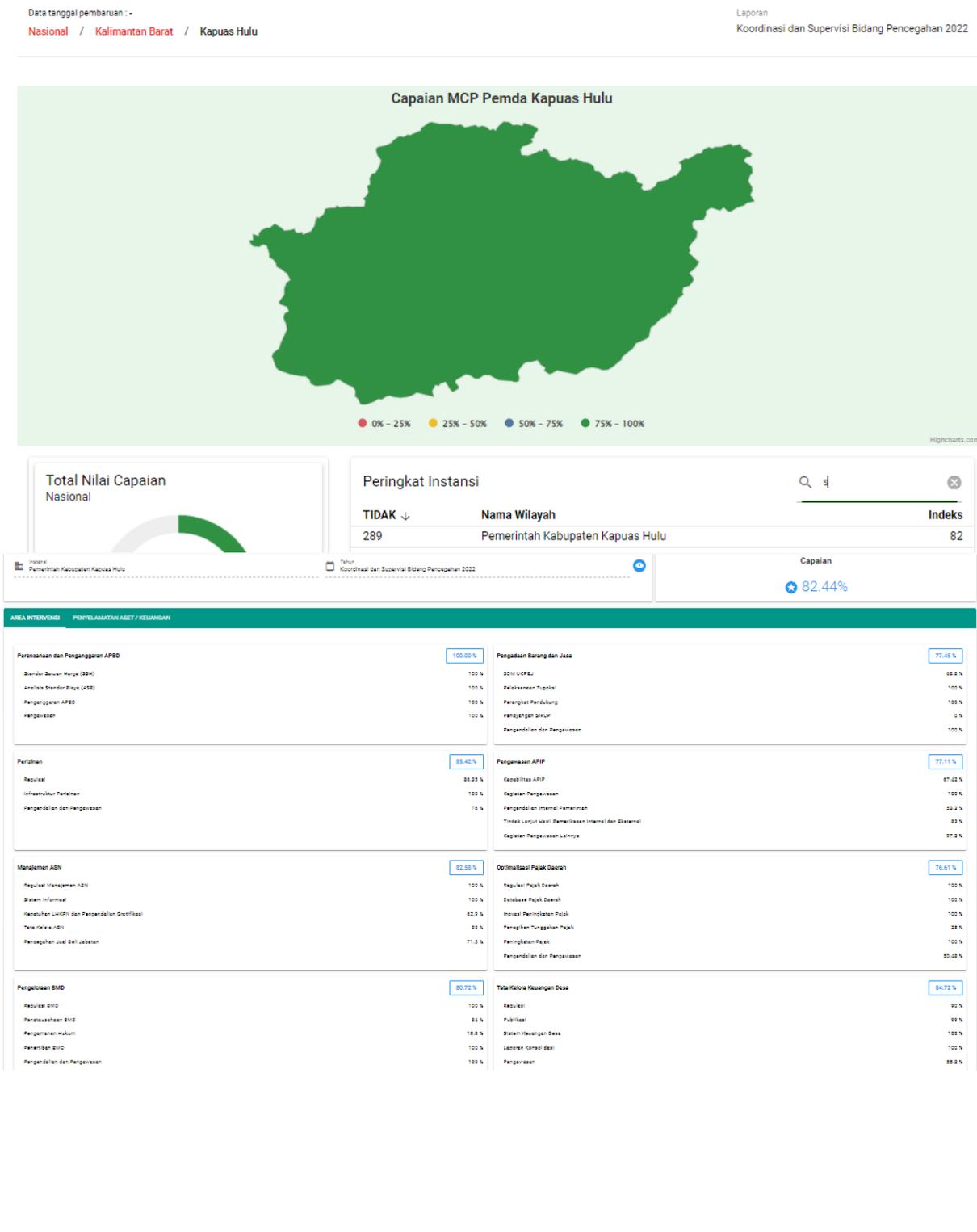
- Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 Presentase OPD dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3 dari 27 Opd masih dibawah Level 3 sehingga capaian target masih 0%. Hal ini disebabkan tidak dianggarkan program kegiatan dan tidak masuk ke dalam PKPT sehingga tidak menjadi prioritas kinerja. Disarankan untuk Menyusun

rencana aksi kegiatan , menganggarkan dan memasukkan ke dalam PKPT tahun 2023.

d. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu

- sampai dengan triwulan IV tahun 2022 telah dilakukan kembali penilaian Monitoring Center for Prevention dengan nilai 82.

Gambar 3.1
NILAI Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu



e. Indikator Persentase ORGANISASI PERANGKAT DAERAH dengan Predikat SAKIP Minimal “BB”

Untuk mencapai target kinerja pada indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Predikat SAKIP Minimal “BB”, Inspektorat menganggarkan pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan Pendampingan Penyusunan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Nilai SAKIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Inspektorat Tahun 2022

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP		
		EVALUASI SEBELUMNYA (2021)	HASIL EVALUASI (2022)	TARGET ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
-1	-2	-4	-5	-6
1	DINAS KESEHATAN	A	A	BB
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BB	BB	BB
3	DINAS PENENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BB	BB	BB
4	DINAS KOPRASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	BB	BB	BB
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	BB	BB	BB
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	BB
7	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	A	A	BB
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BB	BB	BB

9	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	A	A	BB
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN SUMBER DAYA AIR	A	A	BB
11	BADAN KEUANGAN DAERAH	BB	BB	BB
12	DINAS PERHUBUNGAN	BB	B	BB
13	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN	BB	BB	BB
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	BB	BB	BB
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BB	BB	BB
16	DINAS PERIKANAN	BB	BB	BB
17	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	BB	BB	BB
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	B	C	BB
19	INSPEKTORAT	BB	BB	BB
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B	CC	BB
21	DINAS KEPEMUDAAN PARIWISATA DAN OLAHRAGA	B	C	BB
22	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP DAN KB	CC	CC	BB
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BB	B	BB

24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D	B	BB
25	SEKRETARIAT DAERAH	B	D	BB
26	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	D	B	BB

Inspektorat melakukan evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022, pelaksanaan evaluasi sebelumnya ditangani oleh Inspektorat Pembantu Khusus. Setelah Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Pembantu sesuai dengan wilayah pengawasannya. Pada saat evaluasi, nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah pengawasan Inspektorat ada 13 OPD yang memiliki predikat “BB” , 4 OPD yang memiliki predikat “A” dan 9 OPD yang masih memiliki predikat dibawah BB dari keseluruhan perangkat daerah sebanyak 26 perangkat daerah..

Belum tercapainya target 85% dengan SAKIP Perangkat Daerah berpredikat minimal BB disebabkan belum maksimalnya komitmen di perangkat daerah terkait dalam pencapaian tujuan organisasi, tidak menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya dan sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka upaya pemenuhan target tersebut, dilakukan pendampingan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Sehingga diharapkan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu yang mendapat Predikat SAKIP “BB” menjadi 26 OPD.

f. Indikator Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas

- Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu dari Hasil Audite BPK mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2017, 2018 dan 2019, sehingga Kab. Kapuas Hulu diharuskan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu, ini merupakan IKU baru yang ditetapkan pada

Inspektorat, untuk tahun 2019 Inspektorat belum menetapkan Organisasi Perangkat Daerah mana yang akan dijadikan Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu. Kegiatan Zona integritas akan dilaksanakan pada Tahun 2022 dengan target 2 Organisasi Perangkat Daerah. Namun pemilihan ini Perangkat Daerah ini belum terealisasi dikarenakan belum siap nya sumber daya yang tersedia dari segala aspek. Dalam upaya Inspektorat untuk mencapai target pada tahun ini akan dilakukan rapat internal terkait koordinasi pemilihan Perangkat Daerah yang dapat ditetapkan ke dalam Zona Integritas.

g. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi

- Untuk Nilai Triwulan Iv Tahun 2022 nilai Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 31,50 %. Sehingga telah mencapai target pada tahun 2022.

h. Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2018 Inspektorat mendapatkan predikat Kapabilitas APIP Level 3 dengan catatan, ada 2 elemen yang masih pada level 2 yaitu Peningkatan SDM dan Praktek Profesionalisme, serta harus membuat PKPT Berbasis Risiko, untuk itu pada Tahun 2019 Inspektorat harus melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Kapabilitas APIP adalah penilaian dari BPKP terhadap kualitas APIP/Inspektorat Kab. Kapuas Hulu. Kapabilitas APIP Tahun 2019 Inspektorat Kab. Kapuas Hulu pada level 2. Dan untuk tahun 2021 masih belum ada penilaian ulang dari BPKP sehingga belum ada perubahan dalam penilaian dengan tahun sebelumnya.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

Permasalahan secara umum di dalam pencapaian target kinerja Inspektorat antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi antar Inspektorat Pembantu terutama terkait pelaksanaan PKPT yang sama, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan pengawasan dimaksud;
- b. Adanya keterlambatan penyampaian data SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan evaluasi menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- c. Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP serta belum ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, sehingga nilai SAKIP menjadi rendah;
- d. Kurang pahamnya Organisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen SPIP diantaranya (Manajemen risiko, RTP, RR) serta Dokumen yang berjenjang atau berkesinambungan pada Tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Kurangnya Organisasi Perangkat Daerah dalam menerapkan SOP pada Kegiatannya;
- f. Kurangnya pembinaan APIP terhadap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Organisasi Perangkat Daerah belum memahami dokumen SPIP yang diminta oleh Tim BPKP.
- g. Kurangnya Rapat Evaluasi pada Inspektorat, sehingga target yang akan dicapai belum maksimal;
- h. Kurangnya pengetahuan APIP terhadap SPIP dan Kapabilitas APIP, SAKIP, Reformasi Birokrasi.
- i. Masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang kurang aktif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI, BPKP-RI, APIP.
- j. Proses input data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang masih manual, sehingga terdapat perbedaan antara data yang ada di Inspektorat dengan data yang ada pada Sub Bagian Analisa dan Pelaporan;
- k. Terbatasnya personil yang menangani tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga terdapat beberapa pekerjaan Sub Bagian Analisis dan Pelaporan ditangani sendiri oleh Inspektorat, seperti Pencatatan Nomor Laporan, Penyusunan dan Penjilidan Laporan serta pemutakhiran data rekapitulasi progres penyelesaian hasil pemeriksaan.
- l. Banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Audite, terutama untuk Tahun 2022 dan tahun sebelumnya yang penanganannya masih dilaksanakan oleh Sekretariat;
- m. Masih terdapat pelaksanaan pengawasan di luar PKPT, sehingga penanganan pengaduan masyarakat menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. SOLUSI

Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam rangka untuk menangani permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut :

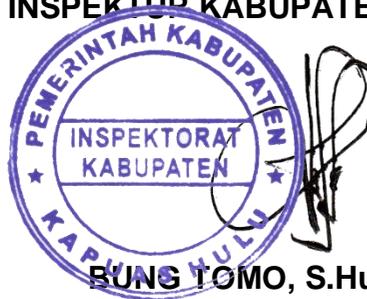
- a. Melakukan koordinasi antar Inspektorat Pembantu, baik terkait masalah penyusunan PKPT berbasis risiko maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pengawasan;
- b. Melakukan pendampingan yang intensif terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP, SPIP, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Risiko Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Analisa dan Pelaporan mengenai penanganan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik terhadap data maupun proses penyusunan dan penyaluran laporan;
- d. Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, terutama terhadap rekomendasi-rekomendasi tahun sebelumnya dengan kegiatan Larwaskab dan Majelis TPTGR;
- e. Penyusunan jadwal penanganan pengaduan masyarakat dan meminimalisir pelaksanaan pengawasan di luar PKPT.
- f. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pelaporan Pengaduan pada Inspektorat.
- g. Melakukan diklat untuk peningkatan SDM pada APIP, terutama pada penyusunan Manajemen Risiko, Audit Investigasi, Audit Kinerja, Maturitas SPIP, dan Kapabilitas APIP serta Probit Audit.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Internal pada Inspektorat untuk mendapatkan perhatian dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Putussibau, 10 Januari 2023

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,



BUNG TOMO, S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700604 199803 1 009